

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 berisikan:

1. *Latar Belakang*
2. *Maksud dan Tujuan*
3. *Sejarah, Kedudukan dan Letak Geografis Kabupaten Bengkulu Selatan*
4. *Isu Strategis*
5. *Struktur Pemkab Bengkulu Selatan*
6. *Keragaman SDM Pemkab B.S*
7. *Sistematika Penyajian LKj Pemkab B.S*

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, diperlukan penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah sebagai salah satu kunci. Hal ini selaras dengan tujuan perbaikan dan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan dalam perbaikan kinerja pemerintahan untuk mencapai daerah otonomi yang lebih baik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang ada di lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

LKj KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat pemerintah Kabupaten disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Maksud dan Tujuan

LKj Pemkab Bengkulu Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemkab Bengkulu Selatan. Identifikasi potensi, keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. LKj adalah Sebagai pembanding keberhasilan, capaian kinerja tahun 2017 juga dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang lalu. Analisis atas pembandingan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat celah kinerja (*performance gap*) yang perlu diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dimasa datang.

1.3. Sejarah, Kedudukan dan Letak Geografis Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Pada Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula tergabung dengan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma menjadi Kabupaten mandiri berdasarkan UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma. Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan.

Gambar 1.1
Peta Batas Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan



Secara astronomis, Kabupaten Bengkulu Selatan terletak antara 4 10' Lintang Utara dan 4 34' Lintang Selatan dan antara 102 48' – 103 17' Bujur Timur dan dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.

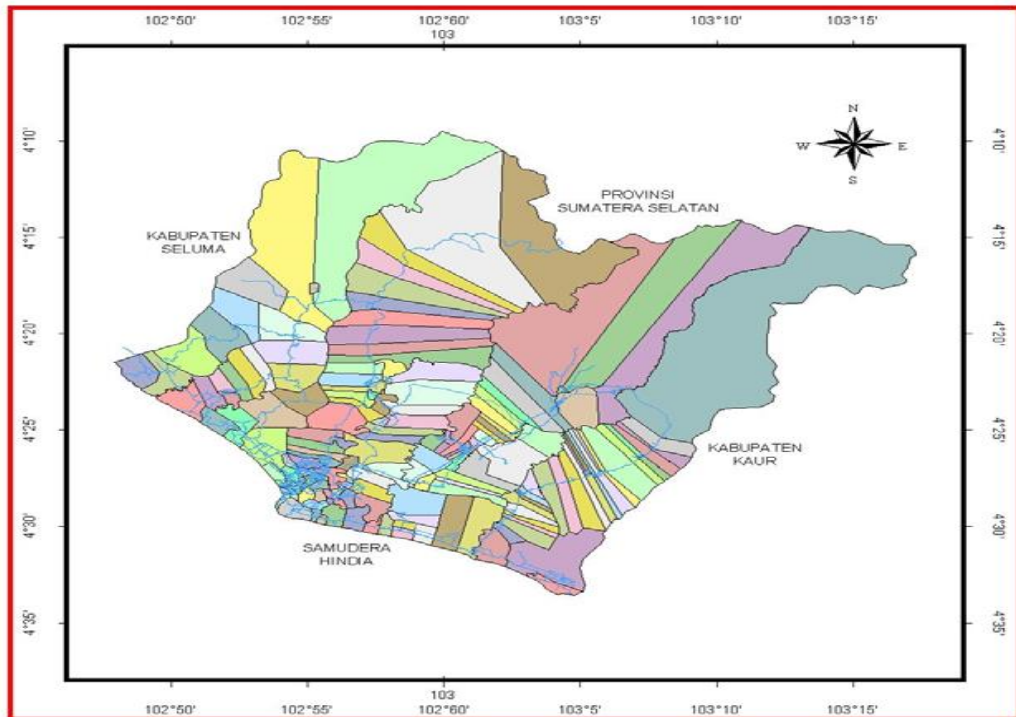
Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki batas :

- Utara : Kabupaten Seluma
- Selatan : Kabupaten Kaur
- Barat : Samudera Hindia
- Timur : Propinsi Sumatera Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki luas wilayahnya 1.186,10 km² atau 19,93 % yang merupakan wilayah daratan, sedangkan luas wilayah lautan dengan panjang garis pantai 60 km dan dengan luas pengelolaan 4 mil, maka luas keseluruhan wilayah lautan, yaitu 384 km² atau 38.400 ha.

Dengan demikian Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan, yaitu 156.970 ha atau 1.569,70 km².

GAMBAR 1.2.
PETA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
MENURUT DESA/ KELURAHAN/ UPT 2016

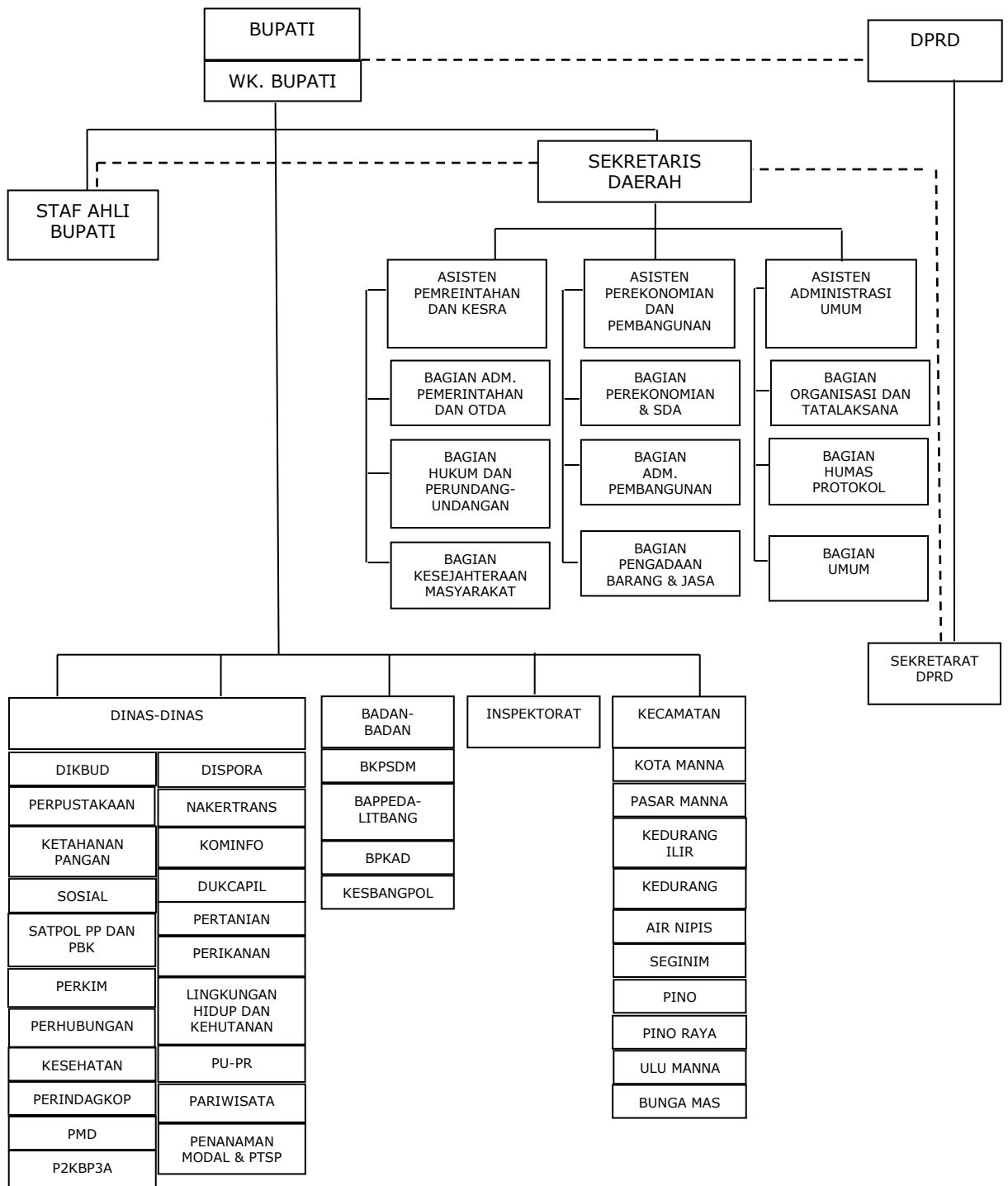


1.4. ISU STRATEGIS

Beberapa Isu Strategis Kabupaten Bengkulu Selatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang masih rendah.
2. Masih tingginya angka kemiskinan.
3. Belum meratanya pelayanan kesehatan dan pendidikan beserta fasilitas pendukungnya.
4. Pengembangan budaya local yang berkarakter.
5. Peningkatan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
6. Peningkatan infrastruktur dan tataruang.

1.5. STRUKTUR PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Sumber : Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Susunan Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas

Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri atas :

- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Pertanian
- Dinas Sosial
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Perikanan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Pariwisata
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Dinas Perhubungan

5. Badan

Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri dari :

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

6. Kecamatan

Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan, terdiri atas :

- Kecamatan Kota Manna
- Kecamatan Pasar Manna
- Kecamatan Manna
- Kecamatan Kedurang Ilir
- Kecamatan Kedurang
- Kecamatan Air Nipis
- Kecamatan Seginim
- Kecamatan Pino
- Kecamatan Pino Raya
- Kecamatan Ulu Manna
- Kecamatan Bunga Mas

1.6. KERAGAMAN SDM PEMDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kapasitas Sumber Daya Manusia dalam jumlah dan kualitas yang cukup memadai. Per Maret 2018, Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 2840 orang (59%), kemudian SLTA/DI sebanyak 862 orang (20%). Selain itu, PNS dengan pendidikan S2 dan D3 juga cukup banyak, yaitu berturut-turut sebanyak 249 orang (5,2%) dan 560 orang (12%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemda Bengkulu Selatan memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
**Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bengkulu Selatan
berdasarkan tingkat pendidikan**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	249
2.	S1	2840
3.	D3	560
4.	D2	252
5.	D1/SLTA/MA/SMK	862
5.	SLTP/MTs	26
6.	SD	15
Jumlah		4.804

Sumber : BKD Kab. Bengkulu Selatan per Maret 2018

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, maka format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta kendala-kendala dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017.

BAB I : Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi
PENDAHULUAN dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian
PERENCANAAN kinerja tahun yang bersangkutan.
KINERJA

BAB III : A. Capaian Kinerja Organisasi
AKUNTABILITAS Pada sub ini disajikan capaian kinerja organisasi
KINERJA untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
ORGANISASI organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja)

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan target anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian
PENUTUP kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

Di samping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Rencana Kinerja Tahunan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dan lain-lain yang dianggap relevan.